

**ABSTRAKSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2013**

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ULP) KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 01 TAHUN 2013	
Abstrak	: <ul style="list-style-type: none">a. Dasar Pembentukan Perbup bahwa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kabupaten Banjarnegara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, terbuka, bersaing, adil/tidak memihak, yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan, maka perlu menetapkan Kedudukan, Tujuan dan Ruang Lingkup Tugas Unit Layanan Pengadaan.
	<ul style="list-style-type: none">b. Dasar Hukum pembuatan perbup : UU 13 tahun 1950, UU 5 tahun 1999, UU 28 tahun 1999, UU 32 tahun 2004, UU 11 tahun 2008, UU 14 tahun 2008, UU 12 tahun 2011, PP 32 tahun 1950, PP 79 tahun 2005, PP 38 tahun 2007, Perpres 54 tahun 2010, Perpres 106 tahun 2007, Peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 002 tahun 2009.
	<ul style="list-style-type: none">c. Perbup ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">1. Kedudukan, tujuan dan ruang lingkup ULP;2. Organisasi ULP;3. Prosedur kerja;4. Kewajiban dan larangan
Catatan	: <ul style="list-style-type: none">1. Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja ULP berhak mendapatkan honor berdasarkan jumlah paket yang dilelang yang besarnya disesuaikan dengan standar honor yang ditetapkan oleh Bupati.2. Sebelum ditetapkannya ULP menjadi unit kerja sendiri, maka ULP dikelola oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 Januari 2013).

**ABSTRAKSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2013**

PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 03 TAHUN 2013	
Abstrak	: a. Dasar Pembentukan Perbup bahwa guna memudahkan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dengan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik, maka perlu ditetapkan Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Melalui Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
	b. Dasar Hukum pembuatan perbup : UU 13 tahun 1950, UU 8 tahun 1974, UU 17 tahun 2003, UU 1 tahun 2004, UU 32 tahun 2004, UU 11 tahun 2008, UU 12 tahun 2011, PP 32 tahun 1950, PP 58 tahun 2005, PP 39 tahun 2007, Permendagri 13 tahun 2006, Peraturan kepala BKN 7 tahun 2008.
	c. Perbup ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Maksud dan tujuan; 2. Pembayaran gaji; 3. Pengambilan gaji PNS; 4. Evaluasi dan pelaporan
Catatan	: 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Edaran. 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.

**ABSTRAKSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
2013**

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 04 TAHUN 2013	
Abstrak	: a. Dasar Pembentukan Perbup bahwa mengingat prasarana pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional dan untuk mendukung kelancaran penyediaan pupuk sesuai dengan rekomendasi teknis dan kebutuhan di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013.
	b. Dasar Hukum pembuatan perbup : UU 13 tahun 1950, UU 8 tahun 1999, UU 32 tahun 2004, UU 12 tahun 2011, PP 32 tahun 1950, PP 38 tahun 2007, Perpres 77 tahun 2005, Peraturan Menteri Perdagangan 21 tahun 2008, Peraturan Menteri Perdagangan 17 tahun 2011, Peraturan Menteri Pertanian 69 tahun 2012, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 634 tahun 2002, Keputusan Menteri Pertanian 43 tahun 2007, Pergub 62 tahun 2012.
	c. Perbup ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Peruntukan pupuk bersubsidi; 2. Kebutuhan pupuk dan alokasi pupuk bersubsidi; 3. Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi; 4. Pengawasan dan pelaporan
Catatan	: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Januari 2013).